

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pemerintahan daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh pemerintahan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 dan direvisi dengan UU No 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) mendapat tanggungjawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintahan pusat.

Sejalan dengan adanya peraturan diatas meletakan perubahan yang fundamental untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi oleh pemerintahan daerah kabupaten Sukabumi. Berbagai upaya penggalan maupun pengembangan potensi daerah yang ada didaerah kabupaten Sukabumi dituntut untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, karena akan digunakan sebagai salah satu modal pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Dan otonomi daerah harus dilakukan secara nyata, luas dan bertanggungjawab. Tujuan dilakukannya pembagian daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan diterapkannya otonomi daerah agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pelayanan publik, sehingga dapat membiayai kegiatan rumah tangganya, upaya dalam meningkatkan sumber daya yaitu dengan cara menggali sumber penerimaan dari pungutan pajak daerah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur agar mampu membiayai dirinya sendiri.

Merujuk pada UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD terdiri dari :(1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Dalam era otonomi daerah PAD menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintahan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Dengan menggali potensi pajak daerah yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya.

Seperti halnya pemerintahan daerah kabupaten atau kota lainnya yang ada diseluruh Indonesia, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kabupaten

Sukabumi diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Otonomi daerah menuntut Pemerintahan Kabupaten Sukabumi untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar.

Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah terlihat dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Masdiasmo, 2002):

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dana bantuak dari pusat.
5. Belum diketahuin potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Barat, tepatnya berada di antara perbatasan kabupaten Bogor, kabupaten Lebak, dan juga kabupaten Cianjur. Dan Kabupaten Sukabumi ada banyak hal hal menarik yang bisa dikunjungi mulai dari objek wisata.

Ada beberapa keunggulan dari Kabupaten Sukabumi dalam bidang pariwisata yaitu curug cikaso yang merupakan tempat air terjun, arum jeram di sungai citarik sembari menguji adrenalin maka disini tempatnya, dan geopark ciletuh yang sedang di gadang-gadang oleh semua orang saat sekarang ini, merupakan tempat air terjun yang indah. Dan juga tak ketinggalan pantai di palabuhanratu.

Tabel 1.1
Jenis Objek Wisata Di Kabupaten Sukabumi

Jenis Objek Wisata		Jumlah
I.	Alam :	46
	1. Hutan	3
	2. Pantai	21
	3. Muara	7
	4. Air Panas	1
	5. Situ	2
	6. Air Terjun	15
	7. Goa	4
II.	Buatan :	7
	1. Tempat Rekreasi	3
	2. Peninggalan Sejarah	2
	3. Perkebunan Teh/Bunga	2
III.	Minat Khusus:	8
	1. Arung Jeram	2
	2. Arung Gelombang	1

	3.	Diving	1
	4.	Surfi	2
	5.	Wisata Religi	1
	6.	Wisata Buru	1
		Total	58

Sumber Data Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi 2018

Melihat dari beberapa tempat pariwisata yang memungkinkan dapat meningkatkan PAD sehingga potensi Kabupaten Sukabumi harus dikembangkan hingga dapat meningkatkan citra daerah sehingga dapat meningkatkan juga pendapatan asli daerah. Salah satu upaya Pemerintahan Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkannya PAD adalah melalui pajak daerah yaitu pajak hotel.

Hotel merupakan salahsatu sarana penginapan atau tempat tinggal sementara selama berada di Kabupaten Sukabumi, karena melihat daerah Kabupaten Sukabumi dekat dengan tempat pariwisata, sehingga hotel digunakan juga sebagai sarana bermain dan berkumpul, pesta ulang tahun, pernikahan, dan acara lainnya untuk dipakai orang menginap dan dipungut bayaran.

Namun sesuai dengan Perda No. 18 tahun 2011 tentang Pajak Hotel disebutkan bahwa objek pajak hotel adalah hotel bintang, hotel melati, wisman dan gedung pertemuan. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dapat diperoleh bahwa wajib pajak hotel. Semakin banyaknya bangunan hotel atau penginapan maka laju pertumbuhan hotel tersebut semakin tinggi sehingga penerimaan pajak daerah pun ikut meningkat.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Sukabumi

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2015	1,500,000,000.00	2,312,299,309.00	154,15%
2016	2,000,000,000.00	2,582,314,861.00	129,11%
2017	2,250,000,000.00	2,758,492,138.00	122,59%

Sumber data BAPENDA Kabupeten Sukabumi 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukabumi dari tahun ke tahun semakin besar, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan hal ini membuktikan bahwa pajak hotel sangat potensial sebagai penerimaan pajak daerah Kabupaten Sukabumi.

Peningkatan penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak karena apabila dicermati dalam realisinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun nya. Dengan penerimaan tahun 2015 sebesar 2,312,299,309.00 atau 154,15% dan ditahun 2016 sebesar 2,582,314,861.00 atau 129,11%, sedangkan di tahun 2017 sebesar 2,758,492,138.00 atau 122,59%. Maka terlihat jelas penurun yang terjadi dari tahun ketahun nya.

Dalam uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian dengan judul :

“ANALISIS PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKABUMI (studi kasus pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah)”

B. Identifikasi Masalah

Peningkatan penerimaan pajak hotel aspek yang sangat penting untuk diteliti sebagai suatu pendekatan dalam memahami peningkatan penerimaan pajak daerah terdiri dari potensi pajak hotel, yang merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kekuatan/ kemampuan dari pajak daerah di Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang dilakukan melalui analisis yang mendalam terhadap sistem dan prosedur, petugas pemungut pajak, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, dan yang terutama adalah pengawasan baik berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan terhadap pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sukabumi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peningkatan penerimaan pajak hotel sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui peningkatan penerimaan pajak hotel sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan manfaat penelitian umumnya dipilah menjadi dua kategori, yaitu teoritis dan praktis. Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan administrasi publik, khususnya yang terkait dengan Analisis Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi (studi kasus pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah).

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana Analisis Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi (studi kasus pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah).

2) Bagi Instansi Terkait Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

F. Kerangka Berpikir

Fokus dan lokus terhadap suatu sasaran dalam memecahkan masalah yang dikemukakan penulis, diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran yang berupa dalil, hukum, teori, serta pendapat dari para ahli yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Berkaitan dengan topik yang penulis ajukan, maka penulis mengemukakan pengertian yang berpedoman kepada para ahli.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) Penerimaan Pajak adalah pajak negara yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa,

pajak bea materai, bea perolehan tanah dan bangunan, penerimaan negara yang berasal dari migas.

Peranan penerimaan pajak menjadi primadona pembayaran pembangunan karena semakin besar penerimaan pemerintah dari sector pajak dibandingkan biaya-biaya rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika penerimaan pajak semakin meningkat, maka pembangunan sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Dan terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak pada warga negara. Hal ini kemudian menjadi dimensi dari penerimaan pajak, yaitu menurut Rahayu (2010: 27-29):

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kebijakan pemerintahan dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
4. Pelayanan.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral tinggi).

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir Penelitian



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG